

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan. Ketika berinteraksi manusia akan mengalami permasalahan yang akan dihadapinya. Permasalahan akan muncul ketika adanya ketidakselarasan antara suatu perilaku dengan norma yang ada di masyarakat. Konsep norma menurut Kartono (2015) adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar, atau patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup terasa aman dan menyenangkan. Hal tersebut yang menjadikan pentingnya seseorang dalam mematuhi sebuah norma dalam masyarakat. Ketidakpatuhan seseorang terhadap norma dapat mengacu pada adanya penyimpangan sosial dalam masyarakat.

Secara teoritis penyimpangan sosial menurut Lawang (2008) adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Penyimpangan sosial yang patologis menurut Kartono (2015) adalah perjudian, korupsi, kriminalitas, *mental disorder*, dan pelacuran.

Pelacuran merupakan kata lain dari prostitusi. Kata prostitusi menurut Sunarto (2013) berasal dari bahasa latin "*prostitute*" yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata "*prostare*" artinya menjual, menjajakan. Prostitusi menurut Bonger (dalam Kartono, 2015) adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi dapat diartikan sebagai penyerahan dan penjualan diri. Penjualan tersebut pada dasarnya dijadikan mata pencaharian bagi mereka. Secara tidak langsung penawaran seksual ini dapat mendatangkan keuntungan baik uang maupun keuntungan lainnya. Prostitusi hingga saat ini dianggap sebagai suatu kegiatan yang memalukan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya stigma negatif

dari masyarakat mengenai prostitusi. Hingga saat ini prostitusi juga dianggap sebagai penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kartono (2015) bahwa pada patologi sosial prostitusi masuk ke dalam fase sistematis yaitu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma dan moral tertentu yang berbeda dari situasi umum. Prostitusi pada dasarnya dianggap patologis karena melanggar norma agama, susila, moral, dan hukum. Selain ditinjau dari sudut pandang pelanggaran norma di atas prostitusi memiliki banyak dampak negatif yang tidak dapat dipungkiri.

Dampak negatif dari adanya prostitusi menurut Kartono (2015) adalah sebagai berikut: (1) menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit; (2) merusak sendi-sendi kehidupan keluarga; (3) memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak pada masa pubertas dan adolesensi; (4) berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkoba; (5) merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama; (6) adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain; dan (7) memicu penyebab terjadinya disfungsi seksual. Prostitusi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya dampak negatif yang dilatarbelakangi oleh prostitusi akan memunculkan permasalahan yang kompleks bagi masyarakat maupun pemerintah setempat.

Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang terjadi di berbagai negara maupun daerah. Salah satu daerah yang tidak lepas dari permasalahan prostitusi adalah Jawa Timur. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial tahun 2012 Jawa Timur menempati *ranking* teratas dengan 53 lokasi dari 161 jumlah lokasi se-Indonesia. Adapun titik lokasi di Jawa Timur terbagi menjadi beberapa titik lokasi. Terdapat 47 lokasi dengan 1.031 mucikari dan 7.127 Wanita Tuna Susila (WTS) yang tersebar di 33 kabupaten/ kota. Dari jumlah tersebut 6 lokasi dengan 534 mucikari dan 2.231 WTS berada di kota Surabaya (Mardiantoro,dkk, 2016). Surabaya merupakan daerah yang memiliki problem sosial prostitusi yang memerlukan penanganan dari beberapa pihak

yang berwenang. Pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan prostitusi yaitu pemerintah setempat. Pemerintah kota Surabaya telah melakukan langkah konkrit dalam menangani prostitusi yakni dengan melakukan penutupan lokalisasi di wilayah Surabaya.

Terdapat beberapa pertimbangan dari pemerintah kota Surabaya untuk memutuskan melakukan penutupan lokalisasi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh wali kota Surabaya Tri Rismaharini alasan penutupan lokalisasi sebagai berikut: (1) terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No.7 tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/ Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; (2) ingin mengajak warganya untuk mencari rizki halal tanpa harus menjual tubuhnya di tempat lokalisasi; (3) menyangkut masalah pendidikan moral anak-anak hingga usia remaja yang berada di sekitar lokalisasi karena secara tidak langsung geliat prostitusi akan berdampak pada psikologis anak-anak di sekitar lokalisasi; dan (4) terdapat WTS yang sudah berumur, tapi yang menjadi langganannya adalah anak-anak sekolah (Mulyadi, 2011).

Keseriusan pemerintah dalam menangani prostitusi juga dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan beberapa elemen dalam pemerintahan maupun elemen masyarakat. Beberapa elemen yang bekerjasama guna melakukan penanganan prostitusi maupun penutupan lokalisasi yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Majelis Ulama Indonesia dan para pendakwah lokalisasi (Mumazziq, 2017). Salah satu elemen masyarakat yang menjadi ujung tombak penanganan prostitusi dari sudut pandang keagamaan yakni pendakwah. Pendakwah menurut Syamsudin (2016) adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, maupun lewat organisasi atau lembaga. Pendakwah dalam penanganan prostitusi dan lokalisasi di Surabaya yakni terhimpu dalam lembaga yang diberi nama Ikatan Da'i Area Lokalisasi (IDIAL). IDIAL merupakan lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang secara operasional menangani program pengentasan Wanita Tuna

Susila (WTS) dan penanganan prostitusi maupun lokalisasi. Lembaga ini dibentuk untuk menghimpun para pendakwah/ *da'i* yang selama ini telah menggeluti kegiatan dakwah seputar prostitusi, dan diperkuat dengan elemen lain seperti praktisi kesehatan, pakar psikologi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian dengan pengentasan WTS dan pemberantasan prostitusi, serta para *da'i* dari berbagai ormas. Fokus program dari IDIAL adalah memberikan pencerahan dan bimbingan menuju alih profesi dan alih fungsi (Mardiantoro,dkk, 2016). Sinergitas antara pemerintah, lembaga IDIAL dan beberapa elemen masyarakat lainnya sehingga penutupan lokalisasi dapat terwujud.

Lokalisasi di Surabaya yang berhasil ditutup oleh pemerintah kota Surabaya bersama IDIAL yakni lokalisasi Dolly, lokalisasi Jarak, lokalisasi Dupak Bangunsari, lokalisasi Sememi, lokalisasi Morokrembangan, lokalisasi Klakah Rejo (Sunarto, 2013). Penutupan keenam lokalisasi tersebut ternyata bukan menjadi akhir dari misi penanganan prostitusi melainkan sebuah tantangan baru bagi pemerintah maupun elemen lainnya yang melakukan misi penutupan lokalisasi. Meskipun penutupan lokalisasi telah dilakukan, namun penutupan tersebut tidak secara utuh menghilangkan aktivitas prostitusi maupun aktivitas penghuni lokalisasi di dalamnya. Secara umum lokalisasi tidak hanya dihuni oleh WTS dan mucikari saja melainkan terdapat beberapa penghuni lokalisasi lainnya yang menggantungkan kehidupan mereka di lokalisasi.

Lokalisasi secara realitanya dihuni oleh WTS, germo atau mucikari (pengkoordinir jasa seksual), preman, pedagang, angkutan umum, tukang parkir dan para penyedia jasa lainnya yang memfasilitasi lokalisasi tersebut. Ribuan bahkan puluh ribuan orang menggantungkan nasibnya dengan keberadaan lokalisasi. Mayoritas dari mereka bekerja di lokalisasi dengan alasan menghidupi keluarga. Secara tidak langsung lokalisasi dianggap sebagai pasar yang sangat menguntungkan bagi mereka. Ketergantungan para penghuni lokalisasi terhadap aktivitas dalam lokalisasi yang menjadi pemicu banyaknya hambatan dalam memberantas prostitusi meskipun telah ditutupnya lokalisasi. Salah satu bentuk sulitnya pemberantasan prostitusi pasca penutupan lokalisasi

yakni adanya kegiatan prostitusi terselubung yang dilakukan mantan penghuni lokalisasi. Sejalan dengan pendapat Mumazziq (2017) meskipun sudah dinyatakan sebagai kampung bebas prostitusi, namun masih terdapat prostitusi terselubung di wilayah eks lokalisasi Surabaya.

Hal ini dibuktikan dengan ditemukan beberapa praktik terselubung dengan berbagai modus, yakni melalui internet, media sosial, dan bermodus penyedia jasa sebagai berikut: (1) polisi sudah berkali-kali membongkar sindikat pelacuran berkedok pijat dan spa pasca penutupan lokalisasi di Surabaya (Harahap 2015); 2) Terbongkar modus mancing plus-plus yang merupakan modus senyap prostitusi Surabaya (Nurroni, 2015); 3) terbongkar kasus mucikari Surabaya jual PSK anak via internet, sampai luar negeri (Harahap, 2015); 4) pasca Dolly ditutup, langsung menjamur tempat karaoke dan hotel-hotel baru yang nyaris tak terjamah aparat penegak hukum (Ardiansyah, 2017); 5) area eks lokalisasi Dolly terdapat calo atau mucikari yang menawarkan layanan seksual terselubung yang dapat dilakukan di kamar kos sekitar eks lokalisasi Dolly (Disna, 2017); dan 6) terdapat bisnis berkembang semenjak penutupan gang Dolly yang berkedok panti pijat tradisional yang dikembangkan oleh mantan mucikari eks Dolly dan telah membuka cabang di beberapa lokasi di Surabaya (Disna, 2017). Berbagai macam modus yang digunakan pelaku prostitusi untuk tetap menjalankan praktiknya di area eks lokalisasi. Praktik tersebut termasuk dalam praktik prostitusi terselubung.

Prostitusi terselubung merupakan sebuah praktik prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) terselubung berarti tertutup. Ketika dikaitkan dengan arti prostitusi maka prostitusi terselubung adalah kegiatan penyerahan dan penjualan diri secara tertutup. Menurut Khalfihim (2017) prostitusi terselubung yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari/ germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Prostitusi terselubung menjadi masalah yang rumit bagi pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya karena praktik yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut yang mendasari bahwa para elemen

yang ikut serta dalam menutup lokalisasi masih memiliki misi lanjutan yakni melakukan pemberantasan prostitusi terselubung di eks lokalisasi. Salah satu pihak yang memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung yakni pendakwah. Pada proses dakwah akan ada tantangan yang akan dihadapi oleh para pendakwah guna merealisasikan misinya.

Setiap usaha yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai setiap tujuan pastilah mendapat hambatan dan tantangan dalam rangka untuk mewujudkannya. Salah satu usaha yang tidak lepas dari hambatan dan tantangan adalah melakukan misi pemberantasan prostitusi terselubung yang dilakukan oleh pendakwah. Menurut Sunarto (2017) dakwah dalam menggeluti prostitusi akan mendapatkan lebih banyak hambatan dibandingkan dakwah pada umumnya. Pendakwah lebih sering menghadapi beberapa risiko yang dapat mengancam kehidupannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan (GT) yang menggeluti dakwah prostitusi:

“Dalam proses dakwah, saya sering mendapatkan hambatan mulai yang kecil hingga besar. Namanya berjuang di jalan Allah SWT pasti ada saja ujiannya. Digoda dengan mbak-mbaknya itu juga. Pernah saya menghadapi preman-preman yang menjaga tempat itu. Bahkan ada yang mengancam dengan mendatangi rumah saya dan membawa parang jika kegiatan dakwah masih saya lakukan. Kalau dulu saat saya dakwah di lokalisasi pernah juga rumah saya dikepung para preman, mucikari dan mbak-mbak yang tidak senang dengan kegiatan saya. Rumah *da'i* lainnya juga didatangi preman dan mbak-mbak itu. Ada juga dari pemilik pratik prostitusi itu mengancam akan membakar rumah saya dan para *da'i* lainnya yang mereka ketahui. Yang paling sulit awalnya adalah meredam amarah dan dendam para penghuni eks lokalisasi yang mengetahui kalau saya juga terlibat dengan pemerintah untuk melakukan penutupan lokalisasi mereka dahulu. Dakwah prostitusi itu memang menantang meskipun sudah eks lokalisasi, tetapi *insyaallah* dakwah ini membawa manfaat yang luar biasa”. (wawancara dilakukan pada tanggal 21 September 2017).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa berdakwah di wilayah prostitusi juga mendapatkan banyak hambatan diantaranya adalah hambatan secara fisik maupun psikis. Secara fisik mendapatkan ancaman berupa kekerasan, ancaman pembakaran tempat tinggal, bahkan ancaman akan melakukan pembunuhan bagi pendakwah yang tetap melakukan dakwahnya di eks lokalisasi. Secara tidak langsung para pendakwah juga terlibat dalam usaha penutupan lokalisasi sehingga ada beberapa pihak yang memiliki perasaan dendam terhadap para pendakwah. Pihak yang hingga saat ini kontra dan memberikan cemoohan maupun sindiran verbal terhadap pendakwah yakni para

mantan preman, mantan PSK, dan mucikari yang tidak bisa menerima adanya penutupan lokalisasi. Para pendakwah juga akan lebih sering berinteraksi dengan orang-orang tersebut di area eks lokalisasi yang sewaktu-waktu dapat mengancam diri pendakwah.

Selain itu terdapat pula hambatan dari para penghuni eks lokalisasi lainnya yang pernah menggantungkan hidupnya ketika area tersebut masih menjadi lokalisasi. Para penghuni eks lokalisasi seperti pedagang, tukang parkir, sopir angkutan yang merasa mata pencahariannya sudah hilang menolak kehadiran para pendakwah yang sebelumnya pernah berdakwah dan bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya penutupan lokalisasi mereka. Para pendakwah sering mendapatkan sindiran verbal dari para penghuni eks lokalisasi tersebut.

Tantangan berdakwah di eks lokalisasi tidak hanya dari pihak internal eks lokalisasi tetapi juga dari pihak eksternal dari eks lokalisasi. Ketika membahas mengenai konflik penutupan lokalisasi silam menurut Sunarto (2013) terdapat pula penolakan wacana penutupan lokalisasi di Surabaya dari beberapa organisasi yakni Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Gerakan Rakyat Bersatu (GRP), Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagarjati), dan beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Beberapa anggota dari organisasi tersebut masih ada yang memberikan tekanan berupa cemoohan dan ancaman verbal bagi para pendakwah yang dimotori oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan GT:

“Sekarang masih ada dari anggota organisasi yang dulu menolak mati-matian penutupan lokalisasi dan membela mbak-mbaknya itu, sampai sekarang ya masih tidak suka dengan kegiatan apapun dari pemerintah yang berbau lokalisasi. Kadang masih berkata kasar dan lain-lain.”. (wawancara dilakukan pada tanggal 21 September 2017).

Pada dasarnya berbagai tantangan yang menghalangi para pendakwah dalam mensukseskan misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi. Pada proses dakwah pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi lebih sulit dibandingkan saat menjadi lokalisasi karena praktik mereka memiliki sindikat yang sulit untuk diungkap. Para pendakwah juga minim keamanan dalam berdakwah secara langsung di tempat prostitusi terselubung tersebut sehingga terdapat banyak risiko yang mungkin dapat terjadi.

Berbagai risiko dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pendakwah tidak menjadikan mereka berhenti melakukan misi dakwah pemberantasan prostitusi bagi para pelaku prostitusi di area eks lokalisasi. Pendakwah tersebut tetap bertahan dalam dakwahnya meskipun hal yang mereka lakukan selalu berhadapan dengan risiko yang besar bagi mereka bahkan keluarga. Ketika dikaitkan dengan beberapa perilaku para pendakwah dalam melaksanakan misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi maka hal itu termasuk dalam perilaku pengambilan risiko. Terdapat banyak kemungkinan yang terjadi akibat keputusan tetap bertahan berdakwah di area eks lokalisasi. Kemungkinan yang akan terjadi adalah berupa dampak positif berupa keberhasilan dakwah maupun dampak negatif yang tidak dapat diprediksikan hal yang akan terjadi. Berdasarkan pemaparan di atas prosentase risiko yang negatif lebih dominan dibandingkan dengan yang positif. Proses pengambilan keputusan untuk melakukan perilaku berisiko tersebut secara psikologis dapat dikaitkan dengan *risk taking behavior* yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini *risk taking behavior* pendakwah yang memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi.

Risk taking behavior yang terdiri dari tiga suku kata mempunyai arti *risk* berarti risiko, *taking* berarti pengambilan, dan *behavior* yang berarti perilaku. Secara umum *risk taking behavior* berarti perilaku pengambilan risiko. *Risk taking behavior* menurut Larasati (dalam Rachmahana, 2002) mengatakan bahwa keputusan individu untuk mengambil tindakan yang berisiko ini didasari oleh adanya kemauan dan keberanian. Individu yang berani mengambil risiko, dalam kondisi gagal akan selalu menerima konsekuensi atau akibat pilihan. Menurut Trimpop (1994) *risk taking behavior* suatu perilaku pengambilan risiko yang dapat membahayakan pelaku dan lingkungan sekitarnya. Bahaya yang dimungkinkan terjadi dapat berupa bahaya fisik, ekonomi, dan kondisi psikososial pengambil keputusan. Adapun *risk taking behavior* pada pendakwah yang memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi akan diungkap melalui aspek *risk taking behavior*. Adapun faktor yang

mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan yang berisiko menurut Gullone (2000) yaitu usia, jenis kelamin, kepribadian, *belief* tentang risiko.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengambilan keputusan berisiko pendakwah adalah yakni kepribadian, di mana tipe kepribadian yang seringkali berkaitan erat dengan pengambilan keputusan yang berisiko adalah ekstrovert. Sebagian besar orang dengan tipe kepribadian ekstrovert diketahui memiliki *sensation seeking* yang tinggi, dan pengambilan keputusan yang berisiko biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki *sensation seeking* yang tinggi. Menurut Zukerman, 1994) *sensation seeking* sebagai suatu trait yang menggambarkan kebutuhan untuk mendapatkan sensasi yang bervariasi, baru, kompleks, intens, dan pengalaman serta kemauan untuk mengambil risiko baik fisik maupun sosial demi pengalaman tersebut. Adapun hasil wawancara dengan informan GT yang berkaitan dengan faktor pertama ini informan ingin mendapatkan pengalaman baru dan hal tersebut berdasar pada kemauannya yang besar untuk mensukseskan misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi.

“Bagaimanapun caranya saya akan berusaha agar mbak-mbak ini bisa bertaubat. Meskipun akan sulit tetapi memberantas yang masih ada ini pasti bisa dilakukan. Sama seperti cara saya dulu ketika dawah di lokalisasinya, saya sekarang ya blusukan juga, karena praktik ini lebih berbahaya dan banyak sindikatnya. Saling nutupi itu yang menjadi kendala utama. Tetapi ini pengalaman yang luar biasa bagi saya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2017)

Faktor kedua yakni *belief* terhadap risiko. *Belief* tentang risiko pada seseorang dapat menentukan apakah orang tersebut akan melakukan pengambilan keputusan yang berisiko atau tidak. Semakin seseorang mempersepsikan suatu tindakan berisiko, semakin besar kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Adapun pemaparan dari informan GT bahwa segala kegiatan yang dilakukan tidak berisiko jika dirinya berhati-hati. Hal inilah yang menjadikan informan GT tetap melakukan misi dakwah pemberantasan prostitusi terselubung di eks lokalisasi.

“ Jika dikatakan berisiko pasti ini berisiko sekali, tetapi jika saya hati-hati, insyaallah saya tidak akan mengalami hal buruk. Setiap niat yang baik akan mendapatkan jalan yang baik pula.” (wawancara dilakukan pada tanggal 24 November 2017).

Faktor ketiga yang mempengaruhi perilaku pengambilan risiko pendakwah adalah usia. Usia merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi seseorang melakukan pengambilan keputusan yang berisiko. Menurut Hurlock (2001) Usia dewasa madya dimulai umur 41 tahun hingga 60 tahun. Adapun pendapat dari Sherril (dalam Robeth, 1994) usia madya merupakan masa di mana seseorang harus menghadapi tantangan hidup dan mengembangkan filsafat untuk mengolah kenyataan yang tidak disangsangka. Ketika pada masa ini seseorang tidak mampu mengembangkan filsafatnya dalam situasi yang tidak pasti maka seseorang pada usia dewasa madya juga dapat melakukan perilaku pengambilan risiko. Selain itu menurut Schaie (dalam Hidayati, 2008) tahap usia madya juga memiliki tahapan kognitif yakni tahap eksekutif, di mana pada tahap ini seseorang memiliki keterlibatan dalam mengurus masalah yang ada dalam sosial masyarakat. Pada tahap ini seseorang akan merasa dirinya bertanggungjawab dengan sosial masyarakatnya. Hal ini juga dialami oleh para pendakwah, rasa tanggungjawab sebagai ulama terhadap masyarakatnya ia berani mengambil keputusan berdakwah di area eks lokalisasi guna menjalankan misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi. Uraian tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Saya berdakwah di daerah lokalisasi karena itu merupakan tanggungjawab saya sebagai warga yang memiliki sedikit pengetahuan agama. Saya tidak akan bisa berdiam diri ketika melihat kerusakan di lingkungan saya. Saya masih memiliki tanggung jawab yang belum terselesaikan, meskipun lokalisasi sudah berhasil ditutup tapi buntutnya masih ada jadi harus ditebas habis dulu”. (wawancara dilakukan pada informan GT pada tanggal 07 Oktober 2017).

Faktor keempat yakni jenis kelamin, di mana laki-laki dianggap sebagai seseorang yang sering mengambil keputusan yang berisiko. Hal ini karena laki-laki mempersepsikan diri mereka yang istimewa, unik dan kebal terhadap hal-hal yang berisiko dibandingkan dengan wanita. Hasil wawancara dengan informan GT bahwa dia berani mengambil risiko karena dia seorang laki-laki yang memiliki anugerah kekuatan dan merasa bahwa perlindungan Tuhan selalu ada.

“Saya memiliki anugerah kekuatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Jadi ketika saya diserang preman ya akan saya hadapi”. (wawancara dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2017).

Keempat faktor di atas membuat para pendakwah eks lokalisasi melakukan perilaku pengambilan risiko. Menurut Triatmojdo (1999) terdapat empat aspek yang mempengaruhi *risk taking behavior* yaitu: (1) dorongan untuk mencari pengalaman baru dan petualangan yang mendebarkan; (2) kemampuan menolerir rasa takut dan rasa cemas; (3) orientasi kesuksesan; (4) dorongan untuk menguji kemampuan.

Pemaparan di atas merupakan gambaran gejala konflik dalam misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi. Di mana konflik terjadi akibat perbedaan persepsi maupun kepentingan dari beberapa pihak. Selain itu banyaknya bentuk tantangan dapat menjadi gambaran bahwa upaya pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi bukanlah suatu misi yang mudah. Ketika pendakwah memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi maka pendakwah akan mengalami pula berbagai konflik, dan tekanan dari pihak yang menolak adanya misi tersebut. Banyaknya tekanan baik fisik maupun psikologis terhadap pendakwah dari pihak kontra menjadikan berdakwah di eks lokalisasi memicu banyak risiko. Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Risk Taking Behavior* Pendakwah yang Memiliki Misi Pemberantasan Prostitusi Terselubung di Eks Lokalisasi Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Lembaga Ikatan Dai Area Lokalisasi)”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi landasan signifikansi dari penelitian ini yakni penelitian yang masih memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat peneliti yakni “*Risk Taking Behavior* Pendakwah yang Memiliki Misi Pemberantasan Prostitusi Terselubung di Area Eks Lokalisasi Surabaya (Studi Kasus Pada Lembaga IDIAL)”. Penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Baik dari variabel penelitian, subjek, metode yang dipakai, dan tujuan dari penelitian.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Rokip (2014), dengan judul “*Risk Taking Behavior Kaum Elite Blater di Kecamatan Konang*”. Tujuan dari penelitiannya adalah: (1) untuk mendeskripsikan *risk taking behaviors* kaum *elite blater*, (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi *risk taking behaviors* kaum *elite blater*, (3) untuk mengetahui dampak *risk taking behaviors* kaum *elite blater* bagi pelaku. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor yang dapat meningkatkan *risk* di Kecamatan Konang yaitu minimnya tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat, lingkungan keluarga yang keras dan keadaan alam yang gersang serta kurangnya penerapan hukum di Kecamatan Konang. Selain itu karena adanya masalah dan tuntutan sosial yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya *risk taking behaviors* pada kaum *elite blater*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rokip adalah adanya perbedaan subjek penelitian dan tempat penelitian. Pada penelitian Rokip subjek penelitiannya adalah kaum *elite blater* dan pada penelitian ini pendakwah yang memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi. Tempat penelitian yang dilakukan Rokip dilakukan di Kecamatan Konang akan tetapi penelitian ini dilakukan di Surabaya. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yakni mengenai gambaran *risk taking behavior*. Persamaan selanjutnya terletak pada metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu penelitian dari Sunarto (2013) yang berjudul “Kyai dan Prostitusi: Pendekatan Dakwah KH. Muhammad Khoiron Suaeb di Lokalisasi Kota Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan *live history*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pendakwah menggunakan pendekatan *mad’u centre*, yaitu sebuah pendekatan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi, psikologi, sosial dan politik sasaran dakwah. Pendakwah tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan pemerintah, namun tidak jarang juga mendapatkan hambatan psikologis dan fisik. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh

Sunarto dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan pendekatan penelitian. Fokus penelitian dari penelitian Sunarto adalah mengenai gambaran keseluruhan proses dakwah yang dilakukan oleh seorang pendakwah. Pada Penelitian ini lebih fokus pada gambaran *risk taking behavior* pendakwah yang memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi. Perbedaan selanjutnya yakni dari pendekatan penelitian, yakni pada penelitian Sunarto menggunakan metode analisis isi dan *live history* akan tetapi pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Sunarto dan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yakni pendakwah yang menggeluti masalah postitusi.

Keunikan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitikberatkan pada gambaran *risk taking behavior* pendakwah yang memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi, di mana subjek disini mengambil *risk taking behavior* meskipun ia sudah mengetahui risiko-risiko negatif yang akan diterima. Pada umumnya berdakwah dilakukan di tempat-tempat ibadah dan lingkungan lainnya yang dirasa tidak memiliki risiko negatif yang tinggi, akan tetapi dakwah yang dititik beratkan oleh peneliti yakni dakwah yang dilakukan di eks lokalisasi dengan tujuan pemberantasan prostitusi terselubung. Eks lokalisasi merupakan suatu area yang dianggap memiliki banyak konflik yang masih membekas pasca penutupan lokalisasi. Peneliti berasumsi bahwa tidak semua para pendakwah yang mampu untuk melakukan dakwah di area eks lokalisasi terutama menangani permasalahan prostitusi. Hal lain yang menjadi keunikan dari penelitian ini yakni pendakwah mengetahui dengan sadar bahwa ia akan mengalami banyak tekanan dan ancaman dari pihak yang dahulu kontra dengan penutupan lokalisasi, namun ia tetap melanjutkan dakwahnya hingga berpindah eks lokalisasi kota Surabaya.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti berasumsi bahwa subjek belum mengetahui *risk taking behavior* yang dia lakukan. Selanjutnya peneliti

merumuskan masalah dari identifikasi masalah yang dipaparkan di atas untuk dikaji lebih mendalam lagi. Fokus penelitian yang akan dibahas dalam karya ini adalah *risk taking behavior* pendakwah yang memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi kota Surabaya (Studi Kasus Pada Lembaga Ikatan Dai Area Lokalisasi).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasar pada pemaparan fokus penelitian di atas. Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *risk taking behavior* pendakwah yang memiliki misi pemberantasan prostitusi terselubung di area eks lokalisasi Surabaya (Studi Kasus Pada Lembaga Ikatan Dai Area Lokalisasi).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian ilmu Psikologi Sosial dan Psikologi Dakwah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi subjek mengenai *risk taking behavior* yang dilakukannya dapat memberikan dampak bagi dirinya dan keluarga. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada subjek mengenai strategi-strategi dakwah yang efektif agar dapat memperkecil tingkat risiko yang dihadapinya.

1.5.2.2 Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan masyarakat tidak memberikan stigma negatif pada pendakwah yang memiliki misi di area prostitusi khususnya area eks

lokalisasi, setelah masyarakat mengetahui gambaran *risk taking behavior* pada para pendakwah prostitusi.

1.5.2.3 Bagi Keluarga Subjek

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai *risk taking behavior* yang dilakukan subjek agar keluarga dapat memberikan dukungan sosial maupun saran agar subjek lebih berhati-hati dalam melakukan perilaku yang berisiko.

1.5.2.4 Bagi Lembaga Ikatan Dai Area Lokalisasi

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga IDIAL (Ikatan Area Eks Lokalisasi) untuk lebih memperhatikan pengambilan keputusan yang berisiko para pendakwah dan dapat memberikan manfaat pemahaman mengenai pemberian keamanan bagi pendakwah yang memiliki misi pemberantasan prostitusi di wilayah eks lokalisasi Surabaya.

1.5.2.5 Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis atau memiliki kesamaan.